

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA), DANA DESAS (DD),  
ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN  
(JPM) TERHADAP ALOKASI BELANJA DESA BIDANG  
PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK,  
DAN DARURAT DESA TAHUN 2020  
(Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Sukoharjo)**

**Fitri Ikhwandari, Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D.  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa dan jumlah penduduk miskin terhadap alokasi belanja bidang penanggulangan bencana keadaan mendesak dan darurat desa. Penelitian dilakukan pada desa-desa di kabupaten sukoharjo yang telah melaporkan laporan realisasi pendapatan belanja desa tahun 2020 secara lengkap dan akurat. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan diperoleh sebanyak 150 desa yang digunakan sebagai sampel. Data penelitian diuji menggunakan metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh terhadap alokasi belanja bidang penanggulangan keadaan mendesak dan darurat desa. Sedangkan dana desa, alokasi dana desa dan jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa.

**Kata Kunci:** Pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana desa, jumlah penduduk miskin, belanja desa bidang penanggulangan bencana keadaan mendesak dan darurat desa.

**Abstract**

This research aims to examine the influence of village original income, village funds, village fund allocation and the number of poor people on the allocation of expenditure in the field of urgent and emergency disaster management in the village. The research was conducted in villages in Sukoharjo district which have reported complete and accurate reports on the realization of village expenditure income for 2020. Research sampling was carried out using documentation techniques and 150 villages were used as samples. Research data was tested using descriptive statistical methods, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The results of the research show that village original income influences the allocation of expenditure in the field of managing urgent and emergency situations in the village. Meanwhile, village funds, allocation of village funds and the number of poor people do not influence the allocation of expenditure in the field of handling disasters, urgent and emergency situations in the village.

**Keywords:** original village income, village fund allocation, village funds, number of poor people, village expenditure in the field of disaster management for urgent situations and village emergencies.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten/kota, di bawah kabupaten/kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktur pemerintahan di Indonesia, desa mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui kebudayaan masyarakat (Syahrul Syamsi, 2014).

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana Non Alam pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Indonesia tengah menghadapi bencana non alam yang sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat terutama didesa. Dikatakan sebagai bencana non alam jika terdapat bencana yang disebabkan oleh serangkaian peristiwa non alam berupa urung modernisasi, urung teknologi, munculnya pandemik maupun maraknya wabah penyakit.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu.

Perkembangan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun

sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan.

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena memerlukan penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (ekstraordinary) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Dengan adanya bencana non alam saat ini maka menjadi sorotan bagi pemerintah. Pemerintah menangani bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan masif terutama masalah dari alokasi anggaran pemerintah pusat. Oleh karena itu terbitlah Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengalokasian keuangan tentang bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dengan adanya landasan yang kuat dapat bermanfaat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah.

Pada saat ini belum ada penelitian yang mengungkap dan mengupas tentang anggaran bencana tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan asal sumber dana penanggannya, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bermaksud meneliti tentang, **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Sukoharjo)”**.

## **2. METODE**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Populasinya adalah desa-desa se-kabupaten Sukoharjo

yang memiliki 150 Desa dari 12 Kecamatan dan 17 Kalurahan. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada. Data yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Penduduk Miskin dan Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tahun 2020. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Variabel yang diteliti meliputi variabel dependen (Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa) dan variabel independen (Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan jumlah penduduk miskin). Metode analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (koefisien determinasi, uji statistik F, uji statistik t).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Analisis

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	PADesa (rupiah)	DD (rupiah)	AAD (rupiah)	JPM (orang)	BDPKD (rupiah)
<i>Minimum</i>	34.900.000	775.774.000	705.044.000	53	50.400.000
<i>Maximal</i>	615.242.000	1.275.019.000	822.950.000	558	966.845.200
<i>Mean</i>	207.962.065,71	967.021.944,00	744.018.886,67	152,25	492.251.791,87
<i>Std. Dev.</i>	129.695.335,957	117451043,381	22299490,248	83,109	159837267,145

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada variabel PADesa besarnya PADesa Rp 34.900.000-Rp 615.242.000 nilai rerata sebesar Rp 207.962.065,71 nilai simpangan baku 129695335,957. Variabel DD besarnya DD Rp 775.774.000-Rp 1.275.019.000 nilai rerata sebesar Rp 967.021.944,00 nilai simpangan baku 117451043,381. Variabel ADD besarnya ADD Rp 705.044.000-Rp 822.950.000 nilai rerata sebesar Rp 744.018.886,67 nilai simpangan baku 22299490,248. Variabel JPM besarnya 53-558 orang nilai rerata 153,25 orang nilai simpangan baku 83,109. Variabel BDPKD Rp 50.400.000-Rp 966.845.200 nilai rerata Rp 492.251.791,87 nilai simpangan baku 159837267,145.

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36172281
Most Extreme Deifferences	Absolute	.125
	Positive	.070
	Ngative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji di atas dengan model CLT (*Central Limit Theorm*) dengan sampel  $150 > 30$  maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF
PADesa	0,867	1,154
DD	0,177	5,637
ADD	0,146	6,843
JPM	0,568	1,761

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan semua nilai Tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , sehingga semua variabel bebas tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	T	Sig
PADesa	-0,938	0,350
DD	1,944	0,054
ADD	-1,324	0,188
JPM	-0,736	0,463

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas di atas dalam penelitian ini menunjukkan semua nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai sig.  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan dalam persamaan regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Constant	-6,127	43,452
PADesa	0,096	0,048
DD	0,386	0,599
ADD	0,772	2,652
JPM	0,107	0,085

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Hasil uji regresi linear berganda di atas dapat disusun persamaan regresi :

$$Y = -6,127(a) + 0,096(\text{PADesa}) + 0,389(\text{DD}) + 0,772(\text{ADD}) + 0,107(\text{JPM})$$

Interpretasi persamaan regresi: (1) Nilai koefisien konstanta ( $a$ ) = -6,127 bernilai negatif hal ini menunjukkan BDPKD akan turun sebesar 6,127 apabila variabel PADesa, DD, ADD dan JPM bernilai konstan (0). (2) Nilai koefisien regresi variabel PADesa ( $b_1$ ) = 0,096 bernilai positif hal ini menunjukkan apabila PADesa semakin ditingkatkan akan meningkatkan BDPKD sebesar 0,096 dengan catatan variabel DD, ADD dan JPM bernilai nol. (3) Nilai koefisien regresi variabel DD ( $b_2$ ) = 0,386 bernilai positif hal ini menunjukkan apabila DD semakin ditingkatkan akan meningkatkan BDPKD sebesar 0,386 dengan catatan variabel PADesa, DD dan JPM bernilai nol. (4) Nilai koefisien regresi variabel ADD ( $b_3$ ) = 0,772 bernilai positif hal ini menunjukkan apabila ADD semakin ditingkatkan akan meningkatkan BDPKD sebesar 0,772 dengan catatan variabel PADesa, DD dan JPM bernilai nol. (5) Nilai koefisien regresi variabel JPM ( $b_4$ ) = 0,107 bernilai positif hal ini menunjukkan apabila JPM semakin ditingkatkan akan meningkatkan BDPKD sebesar 0,107 dengan catatan variabel PADesa, DD dan ADD bernilai nol.

Tabel 6. Hasil Pengujian F

Model	F	Sig.
Regression	4,011	0,004
Residual		
Total		

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Hasil perhitungan uji F diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan  $sig. < 0,05$  atau  $4,011 > 2,37$  dan  $0,004 < 0,05$ , maka pernyataan  $H_a$  diterima kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan variabel bebas yang terdiri dari PADesa, DD, ADD, dan JPM berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat BDPKD.

Tabel 7. Hasil Pengujian t

Variabel Bebas	$T_{hitung}$	$T_{tabel}$	Sig
PADesa	1,992	1,980	0,048
DD	0,644	1,980	0,521
ADD	0,291	1,980	0,771
JPM	1,255	1,980	0,212

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Hasil pengujian t pada tabel 7 di atas dapat ditarik kesimpulan hasil pengujian t sebagai berikut: (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PADesa) terhadap Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). Hasil pengujian t diperoleh nilai  $t_{hitung} 1,992 > 1,980$  didukung nilai signifikansi  $0,048 < 0,05$ , maka pernyataan hipotesis  $H_1$  diterima kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). (2) Pengaruh Dana

Desa (DD) terhadap Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). Hasil pengujian t diperoleh nilai  $t_{hitung}$   $0,644 < 1,980$  dan didukung nilai signifikansi  $0,521 > 0,05$ , maka pernyataan hipotesis H2 ditolak kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan Dana Desa (DD) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). (3) Pengaruh Bagi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). Hasil pengujian t diperoleh nilai  $t_{hitung}$   $0,291 < 1,980$  dan didukung nilai signifikansi  $0,711 > 0,05$ , maka pernyataan hipotesis H3 ditolak kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). (4) Pengaruh Bagi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). Hasil pengujian t diperoleh nilai  $t_{hitung}$   $0,291 < 1,980$  dan didukung nilai signifikansi  $0,711 > 0,05$ , maka pernyataan hipotesis H4 ditolak kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD).

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,316	0,100	0,075	0,36668

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2023

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,316 sedangkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,100 atau 10%, artinya Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Jumlah Penduduk Miskin mampu mempengaruhi Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD) sebesar 10%. Disisi lain, Belanja Desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD) masih dipengaruhi oleh variabel luar sebesar 90% selain variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini, misalnya variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan variabel-variabel lain.

### 3.2 Pembahasan

#### 1) Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD)

Hasil pengujian t diperoleh nilai  $t_{hitung}$   $1,992 > 1,980$  dan didukung nilai signifikansi  $0,048$

$< 0,05$ , maka pernyataan  $H_1$  diterima kebenarannya, sehingga dapat dapat disimpulkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1, pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul termasuk jika hasil dari BUMDesa dan tanah bengkok dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah di Desa, yang sangat berpengaruh terhadap belanja di Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Kelompok Pendapatan Asli Desa, terdiri atas berbagai jenis, yaitu : (1) Hasil usaha desa, antara lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Tanah Kas Desa; (2) Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. (3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong, adalah membangun kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. (4) Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2017), Wardhana (2017), dan Shofa, dkk (2018) yang telah menemukan PADesa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Habibah (2017) PADesa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. Penelitian Mucharomah (2018) PADesa berpengaruh tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat.

## **2) Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD)**

Hasil pengujian t diperoleh nilai  $t_{hitung} 0,644 < 1,980$  dan didukung nilai signifikansi  $0,521 > 0,05$ , maka pernyataan hipotesis  $H_2$  ditolak kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dicairkannya Dana Desa untuk meningkatkan layanan publik di desa,

mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2017), Wardhana (2017), yang telah menemukan dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Habibah (2017) Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. Penelitian Mucharomah (2018) Dana Desa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat.

### **3) Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD)**

Hasil pengujian t diperoleh nilai  $t_{hitung}$   $0,291 < 1,980$  dan didukung nilai signifikansi  $0,771 > 0,05$ , maka pernyataan hipotesis H3 ditolak kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). Menurut Pasal 72 ayat 4 tentang Pemerintahan Desa, alokasi dana desa merupakan alokasi dana yang diperuntukkan untuk desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut kementerian keuangan Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Desa mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besarnya Alokasi Dana Desa berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Henareza, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2017), Wardhana (2017), yang telah menemukan dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Habibah (2017) Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. Penelitian Mucharomah (2018) Dana Desa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### **4) Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin (JPM) terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD)**

Hasil pengujian t diperoleh nilai  $t_{hitung} 1,255 < 1,980$  dan didukung nilai signifikansi  $0,212 > 0,05$ , maka pernyataan hipotesis H4 ditolak kebenarannya, sehingga dapat disimpulkan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD). Penduduk Miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Menurut Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 di desa melalui Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) pemerintah mengambil kebijakan dalam menangani covid-19 desa dengan melalui percepatan realisasi dana desa digunakan untuk Padat Karya Tunai (PKT), Penguatan Ekonomi Desa, dan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan adanya alokasi tersebut maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Maka diharapkan dalam penelitian ini jumlah penduduk miskin dapat berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2017), Wardhana (2017), yang telah menemukan dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Habibah (2017) Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. Penelitian Mucharomah (2018) Dana Desa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD) (sig. 0,048).
- 2) Dana Desa (DD) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD) (sig. 0,521).
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD) (sig. 0,771).
- 4) Jumlah Penduduk Miskin (JPM) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat (BDPKD) (sig. 0,212).

### **4.2 Saran**

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat, meningkatkan pencairan dana desa, hal ini disebabkan hasil penelitian ini menunjukkan variabel bebas alokasi dana desa dan dana desa (DD) merupakan variabel terkecil yang mempengaruhi belanja desa. Agar pembangunan di desa dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.
- 2) Pemerintah Desa, mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), dengan cara mengalokasikan belanja desa untuk usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan asli desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermawan, Istiqomah, dan Abdul Aziz Ahmad. 2019. The Effect of Village Funds on Rural Poverty: Empirical Evidence From Java Island. *International Conference on Rural Development and Entrepreneurship 2019: Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0 Vol. 5 No.1*.
- Aryswahyu Susanto, Moh. Kusnaini dan Badriyah Nurul. 2019. The Role of Village Funds In Village Financial Independence (A Case Study in Jombang Regency). *Journal of Indonesian Applied Economics. Vol. 9, No. 1, February 2021, page. 32-40*.
- Astuti, Novita Dwi. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014". *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Surakarta: Fakultas Ekonomi UMS.
- Fadmawati, Farida. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-desa Kabupaten Wonogiri)". *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Surakarta: Fakultas Ekonomi UMS.
- Febriadmadja, Henariza. 2014. "Praktik Sosial Dalam Alokasi Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)". *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*.
- Febriyanti, Rucika Dewi. Bawono, Andy Dwi Bayu. 2018. "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan Dengan Alokasi Dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai Variabel Moderating Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-desa Kabupaten Wonogiri)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. XVII, No. 2*.
- Habibah, Ummu. 2017. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris di Desa-desa se-Kabupaten Sukoharjo)". *Skripsi*. (tidak dipublikasikan). Surakarta: Fakultas Ekonomi UMS.
- Ismet Sulila. 2019. An Analysis of the Effectiveness of Allocation of Village Fund Policy Implementation and Its Determining Factors in Gorontalo Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik Volume 9 Number 2, July– December 2019. Page 191-202*.
- Komang Adi Kurniawan Saputra<sup>1</sup>, I Made Sara<sup>1,b</sup>, A.A. Ketut Jayawarsa & I Gede Surya Pratama. 2019. Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development. *International Journal of Advances in Social and Economics Available online at <http://journal.iiesindependent.org/index.php/ijase> . Volume 1, Issue 2, August 2019, pp.52-59*.
- Mucharomah, Eva. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 (Studi Empiris Desa-desa di-Kabupaten Wonogiri)". *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Surakarta: Fakultas Ekonomi UMS.

Shofa, Mutiara Alya dkk. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Bandung Tahun 2017)". *Jurnal Aksara Public Volume 2 Nomor 4 Edisi Desember 2018 (190-202)*.

Syamsi, Syahrul. 2014. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 3. No. 1*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Permendesa Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

\_\_\_\_\_, "Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo, 2017-2019". (<https://sukoharjokab.bps.go.id>) (diakses 17 September 2020 pukul 22:16 WIB)

\_\_\_\_\_, "Banyaknya Desa/Kelurahan, Kebayanan, Lingkungan, RT dan RW Menurut Kecamatan, 2017". (<https://sukoharjokab.bps.go.id>) (diakses 20 September 2020 pukul 20:36 WIB)

\_\_\_\_\_, "UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana". (<https://peraturan.bpk.go.id>) (diakses 24 September 2020 pukul 00:12 WIB)

\_\_\_\_\_, "Perubahan Postur Dan Rincian Apbn 2020 Di Masa Pandemi Covid-19". (<http://www.anggaran.kemenkeu.go.id>) (diakses 24 September 2020 pukul 00:54 WIB)

UMS LIBRARY  
-TERAKREDITASI A-